

Original Research

Tingkat kekumuhan dan pola penanganan kawasan permukiman Murjani Bawah di Kota Palangka Raya

Slum level and handling pattern of Murjani Bawah settlement area in Palangka Raya City

Adi Saputra Arief^{1,*}, Herry Redin², Vera Amelia²

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

² Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Palangka Raya

* Korespondensi: Adi Saputra Arief (Email: adisaputraarief.psal@gmail.com)

<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem>

<https://doi.org/10.37304/jem.v2i1.2661>

Received: 6 November 2020

Revised: 14 December 2020

Accepted: 8 January 2021

Abstract

The Murjani Bawah area is a slum area in Pahandut Village, Palangka Raya City with an area of 31.77 hectares. The area has a large enough area of unresolved slums. Decree of the Mayor of Palangka Raya number 188.457564/2018 stipulated a slum area in Palangka Raya City in 2018, the area of slum delineation in Pahandut Village is 39.48 hectares consisting of two locations, namely the Murjani Bawah area of 31.77 hectares and the Pesanggrahan area of 7.71 hectares. This study aims to analyze the causes of slum based on 7 criteria and 16 sub criteria in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 14/PRT/M/2018. Settlement typology, land characteristics and land legality were analysed. In addition, perceptions of community representing by 28 heads RT (neighborhood association) were captured. The status of the slum level is reflected by the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 14/PRT/M/2018. The method for analyzing typology, land characteristics and soil status used the spatial analysis method, for the questionnaire analysis used the Likert scale value-weighting method. The results show that the status of slum in 2016 all RT areas are in a mild slum status. After handling in 2018, 2019 and 2020, there were 8 RTs that were not slum and the rest remained light slums. The highest cause and a priority for handling in the Murjani Bawah area is 97% waste water management, 88% solid waste, 80% drinking water, 78% environmental drainage, 72% environmental roads, 66% buildings and 51% fire protection. The spatial analysis of the land characteristics in the form of swamps and the potential for flooding and inundation is quite high, the typology of settlements is mostly in the lowlands, and the land is not certified. Treatment in the area does not allow it to be handled completely because the biophysical conditions of the land do not allow for the management of wastewater, solid waste and environmental drainage development.

Keywords

Slum level, slum area, typology of slum settlements, land characteristics, slum settlement

Intisari

Kawasan Murjani Bawah merupakan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya dengan luas 31,77 hektar. Kawasan tersebut mempunyai tingkat kekumuhan yang belum tertangani dengan luasan cukup besar. Keputusan Walikota Palangka Raya nomor 188.45/564/2018 ditetapkan kawasan kumuh di Kota Palangka Raya tahun 2018, luas delineasi kumuh di Kelurahan Pahandut 39,48 hektar yang terdiri dari dua lokasi, yakni kawasan Murjani Bawah seluas 31,77 hektar dan Pesanggrahan seluas 7,71 hektar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab kekumuhan berdasarkan 7 kriteria dan 16 sub kriteria dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2018. Dilakukan pula analisis tipologi permukiman, karakteristik lahan dan legalitas tanah dan persepsi masyarakat dengan 28 responden yang terdiri dari para ketua RT. Status tingkat kekumuhan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2018. Metode untuk analisis tipologi, karakteristik lahan dan status tanah menggunakan metode analisis spasial, untuk analisis kuesioner menggunakan metode pembobotan nilai skala Likert. Penelitian menunjukkan status kekumuhan tahun 2016 seluruh wilayah RT dalam status kumuh ringan. Setelah dilakukan penanganan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, terdapat 8 RT yang tidak kumuh dan sisanya tetap kumuh ringan. Penyebab paling tinggi dan menjadi

prioritas penanganannya di kawasan Murjani Bawah adalah pengelolaan air limbah 97%, persampahan 88%, air minum 80%, drainase lingkungan 78%, jalan lingkungan 72%, bangunan 66% dan proteksi kebakaran 51%. Analisis spasial terhadap karakteristik lahan berupa rawa dan berpotensi banjir dan genangan cukup tinggi, tipologi permukiman sebagian besar di dataran rendah, dan tanah tidak bersertipikat. Penanganan di wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk ditangani secara tuntas karena kondisi biofisik lahannya tidak memungkinkan terhadap pengelolaan air limbah, persampahan dan pembangunan drainase lingkungan.

Kata kunci

Tingkat kekumuhan, kawasan kumuh, tipologi permukiman kumuh, karakteristik lahan, permukiman kumuh

1. PENDAHULUAN

Keberadaan permukiman kumuh di Indonesia merupakan masalah yang berulang yang cukup menjadi sorotan publik. Hal ini membuat pemerintah seolah-olah kalah cepat dalam upaya penanganannya. Keadaan ini diperparah dengan minimnya data dan informasi mengenai kualitas dan kuantitas permukiman kumuh tersebut sehingga membingungkan pemerintah daerah dalam mengatur dan menerapkan strategi pola penanganannya. Hal demikian selain berhubungan langsung dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi juga memiliki aspek politik dalam prosesnya (Budiyono dan Supriadi, 2018).

Dampak permukiman kumuh juga akan menyebabkan penilaian buruk dari penyelenggara pemerintahan yang seharusnya dapat melakukan penanganan, permukiman kumuh dipengaruhi oleh tingkatan sosial, budaya masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat yang bermukim di lingkungan kawasan tersebut. Secara ekonomi, masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah sehingga memaksa mereka untuk menempati lokasi-lokasi ilegal dan membangun hunian seadanya (Amri, 2009).

Kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan prasarana dan sarana perumahan belum sepenuhnya terpenuhi, baik berupa lingkungan perumahan dan permukiman, maupun lingkungan yang terjangkau dan layak huni. Oleh karena itu, daya dukung sarana dan prasarana lingkungan perumahan yang ada mulai menurun. Untuk itu, pemerintah telah merumuskan strategi dan arah tujuan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan akan memandu pencapaian tujuan global yaitu pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (Setianingtias et al., 2019).

Menurut Ramadhani (2020), tujuan pembangunan berkelanjutan berfokus pada air bersih dan sanitasi yang layak, mengupayakan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 7 berfokus pada energi yang bersih dan terjangkau dengan memastikan akses ke energi yang

terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Tujuan 11 berfokus pada kota dan daerah permukiman yang berkelanjutan, dan berusaha untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tersebut, bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu indikator keberhasilan.

Sementara itu berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019, penataan kawasan perumahan dan permukiman menjadi prioritas penanganan sampai tahun 2023, salah satunya mengentaskan permukiman kumuh di Kota Palangka Raya.

Kota Palangka Raya yang memiliki luas wilayah ± 285.312,40 ha, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, terdapat permukiman kumuh tahun 2016 dan 2018, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, lokasi kumuh terbesar adalah di Kelurahan Pahandut seluas 39,48 ha yang terbagi 2 (dua) lokasi yakni kawasan Murjani Bawah seluas 31,77 ha dan kawasan Pesanggrahan seluas 7,71 ha. Dalam penelitian ini difokuskan pada lokasi terpadat yakni di kawasan Murjani Bawah seluas 31,77 ha untuk menemukan penyebab tingkat kekumuhan paling tinggi dari 7 (tujuh) kriteria dan 16 (enam belas) sub kriteria yang diatur dalam peraturan menteri nomor 14/PRT/M/2018.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bersumber dari data primer berupa kuesioner terhadap sampel ketua rukun tetangga (RT) sebanyak 28 (dua puluh delapan) responden dengan metode penarikan sampel *non probability sampling* yakni *sampling* jenuh untuk memperoleh penyebab utama kekumuhan yang

Tabel 1 Luas permukiman kumuh Kota Palangka Raya tahun 2018

No.	Lokasi		Luas Kumuh Awal (ha)	Pengurangan Luas Kumuh (ha)	Luas Kumuh Akhir (ha)
	Kelurahan	Kecamatan			
1.	Pahandut	Pahandut	39,48	1,14	38,34
2.	Palangka	Jekan Raya	9,74	0,60	9,14
3.	Langkai	Pahandut	8,97	4,33	4,64
4.	Pahandut Seberang	Pahandut	16,46	2,28	14,18
5.	Kereng Bangkirai	Sabangau	10,62	9,05	1,57
6.	Tangkiling	Bukit Batu	5,94	4,14	1,80
7.	Tumbang Rungan	Pahandut	4,66	-	4,66
8.	Menteng	Jekan Raya	9,33	-	9,33
Total Luas (Ha)			105,2	21,54	83,66

Sumber: SK Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/564/2018

terjadi dan menentukan prioritas penanganan yang tepat untuk setiap wilayah rukun tetangga (RT).

Data sekunder berupa data base line hasil pendataan tingkat kecumuhan yang diolah kembali mengacu kepada peraturan menteri nomor 14/PRT/M/2018, dan data sekunder lainnya seperti peta-peta untuk menggambarkan tipologi dan karakteristik lahan dan status kepemilikan tanah serta dokumen perencanaan yang ada pada pemerintah Kota Palangka Raya.

Menurut Sugiono (2012), penelitian kuantitatif dengan metode *non probability sampling* salah satunya adalah *sampling* jenuh. Arikunto (2019) menyatakan bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang dapat digunakan sampel jenuh.

Sebelum pengambilan data, dilakuan uji validitas dan realibilitas terhadap kuesioner. Perhitungan *validitas* dapat dilakukan dengan rumus *product moment* dan hasil dari perhitungan akan dibandingkan dengan nilai r_{tabel} pada signifikansi 5% (Winarsunu, 2006).

Reliabilitas adalah derajat konsistensi instrumen yang bersangkutan. Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur (Sukardi, 2008).

2.1 Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode observasi langsung, dan observasi tersebut dilakukan langsung di lokasi penelitian. Peneliti mendatangi kawasan permukiman kumuh Murjani Bawah dan mengamati kondisi 7 (tujuh) kriteria dan 16 (enam belas) sub kriteria penyebab kecumuhan yang diatur dalam peraturan menteri nomor 14/PRT/M/2018 yang ada di kawasan tersebut yang telah dilakukan pendataan oleh tim atau fasilitator program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pengumpulan data pendukung dan peta-peta untuk melakukan analisis spasial terhadap karakteristik lahan dan tipologi permukiman bersumber dari data kelerengan, jenis tanah, peta administrasi wilayah rukun tetangga (RT), peta genangan dan peta hidrologi, peta sebaran bangunan, peta sempadan sungai, dan peta-peta lainnya.

Dalam penelitian ini, kuisisioner merupakan alat utama untuk mendapatkan data dari variabel penelitian setelah terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan realibilitasnya. Kuisisioner berguna untuk mendapatkan data tentang prioritas penanganan terhadap penyebab kecumuhan dan wilayah rukun tetangga (RT) menjadi prioritas untuk ditangani di kawasan Murjani Bawah. Variabel-variabel penilaian terhadap tingkat kecumuhan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Dokumentasi dan peta-peta pendukung lainnya dipergunakan untuk kelengkapan data yang tidak diperoleh sebelumnya, yaitu dengan mencatat atau menyalin bahan-bahan berupa gambaran umum, keadaan lokasi penelitian, serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Saat mengukur pernyataan dalam kuisisioner dengan menggunakan skala Likert, responden harus menjawab beberapa pertanyaan. Hasil dari jawaban responden tersebut akan diberikan nilai ST=4, T=3, TT=2, STT=1. Penggunaan skala likert berupa 4 (empat) skala, dengan menghilangkan pilihan ragu-ragu untuk menghindari hilangnya data pernyataan responden (Dwiastuti, 2017).

Hasil kuisisioner kemudian diolah berdasarkan persentase untuk memperoleh nilai kriteria penyebab kecumuhan di lokasi penelitian dan prioritas penanganannya terhadap wilayah rukun tetangga (RT) yang memiliki variabel kecumuhan tertinggi.

Nilai tingkat kecumuhan hasil pendataan fasilitator program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diolah dan dianalisis menggunakan nilai/skor mengacu kepada peraturan menteri no. 14/PRT/M/2018 untuk melihat status tingkat kecumuhan tingkat kecumuhan awal tahun 2016 dan status akhir tingkat kecumuhan tahun 2018.

Analisis spasial menggunakan metode overlay/superimpose terhadap beberapa peta dan data pendukung sehingga memperoleh nilai dan tingkatan prioritas

Tabel 2 Variabel penilaian tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman

No.	Variabel	Indikator
1.	Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan bangunan b. Tingkat kepadatan bangunan c. Ketidakesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
2.	Jalan Lingkungan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan b. Kualitas permukaan jalan lingkungan
3.	Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan akses aman air minum b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4.	Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air b. Ketidakterediaan drainase c. Kualitas konstruksi drainase
5.	Pengelolaan air limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
6.	Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis
7.	Proteksi kebakaran	a. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran b. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018

penanganan di setiap wilayah rukun tetangga (RT) serta untuk memperoleh gambaran karakteristik lahan dan tipologi permukiman terhadap luas dan jumlah wilayah rukun tetangga (RT) di lokasi penelitian.

Kawasan Murjani Bawah mempunyai 28 (dua puluh delapan) rukun tetangga (RT) dan 7 (tujuh) rukun warga (RW) seluas 45,34 hektar (Ha). Sebaran lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.

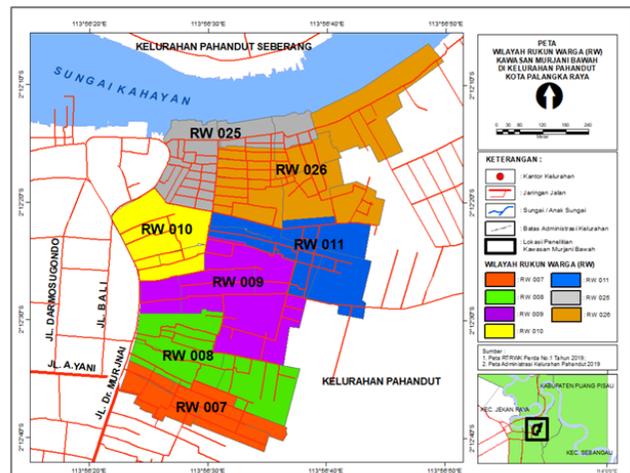
3. KEADAAN UMUM LOKASI

3.1 Letak Geografis dan Kependudukan

Kawasan permukiman kumuh murjani bawah secara geografis terletak pada koordinat 113°56'21" BT-113°56'50" BT dan 2°12'06" LS-2°12'41" LS. Kawasan kumuh Murjani Bawah pada bagian utara berbatasan dengan Sungai Kahayan dan Kelurahan Pahandut Seberang dan bagian selatan berbatasan dengan permukiman jalan murjani, sementara itu pada bagian timur berbatasan dengan tanah kosong berupa semak belukar dan bagian barat berbatasan dengan jalan dr. Murjani.

Berdasarkan rencana pola ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya dan telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 1 tahun 2019, kawasan permukiman kumuh Murjani Bawah terdiri dari kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, kawasan sempadan sungai dan sumber daya air serta lainnya.

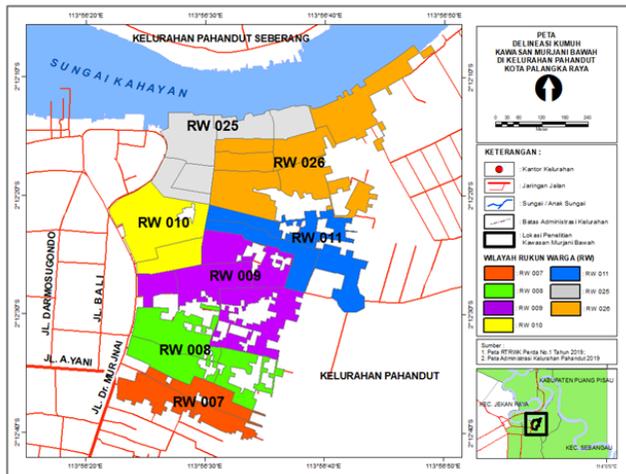
Penduduk di kawasan permukiman kumuh Murjani Bawah mempunyai penduduk sebanyak 9.423 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 2.550 KK dan jumlah bangunan sebanyak 2.478 unit bangunan.



Gambar 1 Peta kawasan kumuh Murjani Bawah

Kawasan Murjani Bawah merupakan kawasan yang padat penduduk dan merupakan salah satu kawasan kumuh perkotaan di Kota Palangka Raya yang tertuang dalam Keputusan Walikota Palangka Raya nomor 188.45/564/2018 tanggal 17 Desember 2018 Tentang penetapan kawasan dan luasan permukiman kumuh di Kota Palangka Raya. Delineasi permukiman kumuh pada kawasan Murjani Bawah yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) rukun tetangga (RT) dan 7 (tujuh) rukun warga (RW) adalah seluas 31,77 hektar (Ha). Peta sebaran tiap-

tiap rukun tetangga (RT) dalam setiap rukun warga (RW) yang terdelineasi kumuh disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Peta delineasi permukiman kumuh Murjani Bawah

3.2 Kondisi 7 Kriteria Tingkat Kekumuhan di Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi kawasan Murjani Bawah terhadap kriteria tingkat kekumuhan adalah sebagai berikut.

- **Kondisi Bangunan**
Kondisi bangunan sebagai kriteria pertama penyebab tingkat kekumuhan di kawasan Murjani Bawah merupakan bangunan dengan konstruksi kayu dengan berbentuk panggung dengan ketinggian rata-rata 1-2 meter dari permukaan tanah. Bangunan di kawasan Murjani bawah juga merupakan bangunan yang dibangun mengikuti luas tanah yang tersedia. Gambaran bangunan di lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.

- **Kondisi Jalan Lingkungan**
Kondisi jalan lingkungan di lokasi Murjani Bawah berupa jalan titian/jembatan yang terbuat dari konstruksi kayu dengan ketinggian lebih kurang 2 meter dari permukaan tanah dan sebagian besar sejajar dengan rumah warga. Ketinggian jalan titian/jembatan tersebut untuk mengantisipasi banjir di lokasi tersebut. Kondisi jalan lingkungan di lokasi penelitian disajikan pada Gambar 4.

- **Kondisi Penyediaan Air Minum**
Kondisi penyediaan air minum di lokasi penelitian kawasan Murjani Bawah, berasal dan bersumber dari jaringan pipa PDAM dan sumur bor. Sumber air lainnya adalah air sungai Kahayan bagi permukiman diatas sungai, dan juga menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber air minum. Kondisi perpipaan PDAM dan sumur bor yang ditampung dalam tanki air disajikan pada Gambar 5.



Gambar 3 Kondisi bangunan di kawasan Murjani Bawah



Gambar 4 Kondisi jalan lingkungan/ jembatan/titian di Murjani Bawah



Gambar 5 Kondisi penyediaan air minum di kawasan Murjani Bawah

- Kondisi Drainase Lingkungan

Kondisi drainase di kawasan Murjani Bawah tidak terdapat drainase di kawasan kumuhnya tetapi drainase lingkungan hanya terdapat di jalan dr. Murjani, saluran drainase di jalan tersebut membatasi wilayah permukiman kumuh di kawasan Murjani Bawah dengan jalan utama.

Kondisi drainase di jalan dr. Murjani sebagian tertutup untuk lahan parkir bangunan ruko di lokasi tersebut dan ada yang tidak berfungsi karena tertutup tanah dan sampah, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6.

- Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kondisi Pengelolaan air limbah berupa air limbah domestik yang bersumber dari buangan air limbah dapur dan air limbah dari kakus/WC. Pada lokasi permukiman kumuh di kawasan Murjani Bawah, sebagian besar tidak menggunakan *septic tank* tetapi berupa bangunan kayu dan langsung dibuang ke tanah (cubluk). Pembuangan

limbah domestik pada lokasi kawasan Murjani Bawah disajikan pada Gambar 7.

- Kondisi Persampahan

Kondisi persampahan di lokasi kawasan Murjani Bawah tidak terkelola dengan baik sehingga masih banyak terdapat sampah-sampah rumah tangga yang dibuang langsung ke tanah dan terjadi penumpukan dibawah rumah warga. Kondisi persampahan di lokasi tersebut disajikan pada Gambar 8

- Kondisi Prasarana Keamanan Bahaya Kebakaran

Kondisi ketersediaan prasarana keamanan bahaya kebakaran di kawasan Murjani Bawah khususnya di permukiman kumuh tidak tersedia. Pemadam kebakaran berupa pos pemantau bahaya kebakaran berikut pemadam kebakaran swadaya kelurahan terdapat di jalan dr. Murjani. Pemadam kebakaran swadaya masyarakat dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 6.
Kondisi drainase di Jalan dr. Murjani



Gambar 7
Kondisi sanitasi pengelolaan
air limbah domestik



Gambar 8
Kondisi persampahan yang tidak dikelola
di kawasan Murjani Bawah



Gambar 9
Pemadam kebakaran swadaya
masyarakat dan pos pemantau

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Kekumuhan

Tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian berdasarkan hasil pendataan fasilitator Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2016 dan 2018 yang menjadi dasar penataan kawasan permukiman kumuh Murjani Bawah di tahun 2019 dan 2020. Identifikasi berdasarkan tingkat kekumuhan per wilayah rukun tetangga (RT) adalah berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 142/PRT/M/2018, dimana terdapat 7 (tujuh) kriteria dan 16 (enam belas) sub kriteria untuk menentukan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman Murjani Bawah dengan skala nilai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Rentang nilai tingkat kekumuhan

No.	Rentang Nilai	Keterangan Kekumuhan
1.	60 - 80	Kumuh Berat
2.	38-59	Kumuh Sedang
3.	16-37	Kumuh Ringan
4.	< 16	Tidak Kumuh

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kekumuhan di kawasan Murjani Bawah terdapat status kumuh awal tahun 2016 seluruh wilayah rukun tetangga (RT) dengan status kumuh ringan dengan rata-rata nilai 16-37, dan setelah dilakukan penanganan dilokasi tersebut sehingga diperoleh status tingkat kekumuhan akhir tahun 2018-2020 terdapat 8 wilayah rukun tetangga (RT) dengan status tidak kumuh dengan nilai <16 dan 20 wilayah rukun tetangga (RT) masih tetap dalam status kumuh ringan dengan nilai 16-37 (Tabel 4).

Perubahan status dari kumuh ringan menjadi tidak kumuh karena penyebab kekumuhan tidak sulit ditangani. Sebaliknya, terdapat beberapa wilayah rukun tetangga (RT) yang masih dalam status kumuh ringan dan memerlukan penanganan secara khusus dan terpadu.

4.2 Tipologi, Karakteristik dan Pertanahan

Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap tipologi permukiman dan karakteristik lahan serta aspek legalitas tanah di lokasi permukiman kumuh kawasan Murjani Bawah merupakan tipologi permukiman diatas air (sungai),

Tabel 4 status tingkat kekumuhan wilayah RT

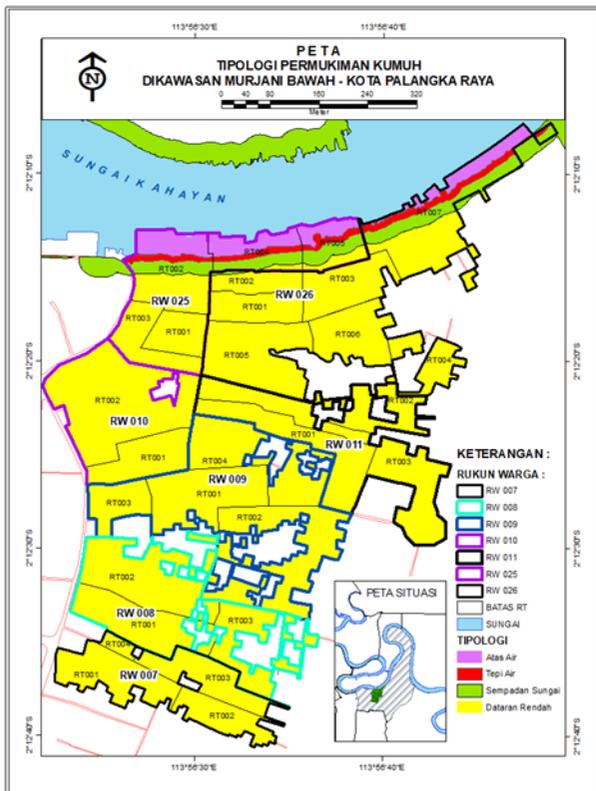
No.	RT	RW	Luas Kumuh (ha)	Kumuh Awal	Kumuh Akhir
1.	001	007	1.05	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
2.	002		0.71	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
3.	003		0.62	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
4.	004		0.38	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
5.	001	008	1.43	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
6.	002		1.90	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
7.	003		1.09	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
8.	001	009	1.57	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
9.	002		1.12	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
10.	003		0.67	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
11.	004		1.48	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
12.	001	010	0.95	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
13.	002		2.43	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
14.	001	011	1.57	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
15.	002		1.34	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
16.	003		2.02	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
17.	001	025	0.62	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
18.	002		1.32	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
19.	003		0.79	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
20.	004		0.72	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
21.	005		0.53	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
22.	001	026	0.74	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
23.	002		0.50	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
24.	003		0.98	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
25.	004		0.61	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
26.	005		1.79	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
27.	006		1.11	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
28.	007		1.70	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan

ditepi air (sungai) termasuk sempadan sungai juga merupakan tipologi dataran rendah. Sebaran tipologi permukiman dilokasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Luasan kawasan Murjani Bawah berdasarkan tipologi permukiman

No.	Tipologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman diatas Air	1.57	4,94
2.	- Permukiman ditepi Air	0.80	2,52
	- Permukiman di dalam Garis Sempadan Sungai	2.09	6,58
3.	Permukiman didataran Rendah	27.31	85,96
Luas Delineasi Kumuh		31.77	100,00

Dari Tabel 5 diketahui bahwa kawasan Murjani Bawah 85,96% merupakan tipologi permukiman di dataran rendah, 4,94% merupakan tipologi permukiman diatas air (sungai) dan selebihnya merupakan permukiman di tepi air (sungai) dan sempadan sungai yaitu 5,46%. Sebaran masing-masing tipologi permukiman di kawasan Murjani Bawah digambarkan pada Gambar 10.



Gambar 10 Tipologi permukiman di kawasan Murjani Bawah

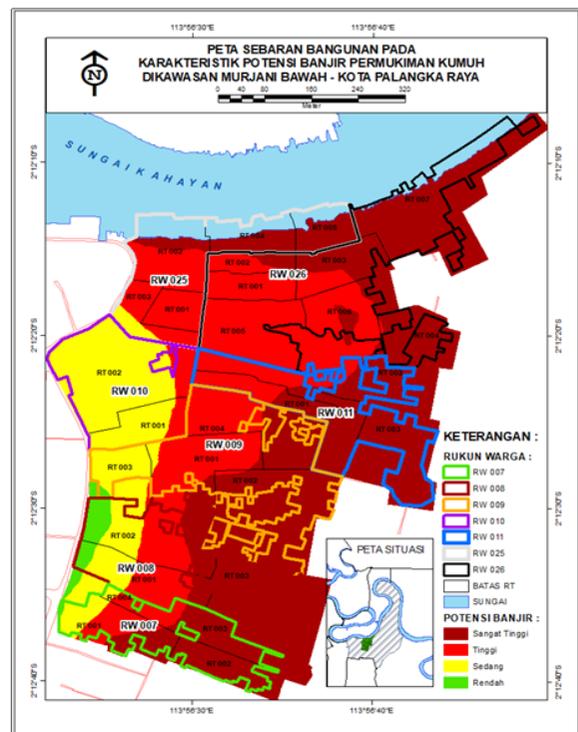
Sementara itu karakteristik lahan di lokasi tersebut merupakan lahan rawa basah yang selalu tergenang, dan

berpotensi banjir ketika air sungai dalam kondisi pasang serta terpengaruh terhadap curah hujan cukup tinggi. Hasil analisis spasial terhadap lokasi dengan karakteristik lahan yang berpotensi terhadap banjir dan genangan sebagaimana dapat disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Karakteristik potensi banjir dan genangan

No.	Karakteristik (Potensi banjir dan Genangan)	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Sangat Tinggi	13.86	43.63
2.	Tinggi	12.14	38.21
3.	Sedang	5.26	16.56
4.	Rendah	0.51	1.61
Jumlah		31.77	100.00

Tabel 6 menyajikan karakteristik lahan yang berpotensi banjir dan tergenang dengan sekitar 43,63% merupakan daerah yang potensi sangat tinggi, 38,21% berpotensi tinggi, 16,56% berpotensi sedang dan 1,61% berpotensi rendah. Dengan demikian di lokasi kawasan Murjani Bawah yang memiliki karakteristik lahan rawa dengan potensi banjir dan genangan didominasi tingkat sangat tinggi. Penanganan 7 (tujuh) kriteria penyebab kekumuhan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 khususnya aspek pengelolaan air limbah, dan drainase mengalami kesulitan dalam pelaksanaan penanganannya. Sebaran karakteristik lahan rawa yang berpotensi banjir dan genangan disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11 Sebaran karakteristik lahan berpotensi banjir dan genangan

Adapun dari aspek legalitas tanah, lokasi kawasan Murjani Bawah memiliki legalitas tanah dengan status sertifikat hak milik (SHM) sebesar 25,65%, sertifikat hak guna bangunan (HGB) sebesar 3,21%, tanpa alas hak tetapi berupa surat keterangan tanah (SKT/SPPT) sebesar 57,35% dan tanpa memiliki surat-surat tanah sebesar 13,79% (Tabel 7).

Tabel 7 Status tanah di kawasan Murjani Bawah

No.	Status Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Sertifikat Hak Milik (SHM)	8.15	25.65
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	1.02	3.21
3.	Surat Keterangan Tanah (SKT/SPPT)	18.22	57.35
4.	Tidak Ada Surat-surat	4.38	13.79
Jumlah		31.77	100,00

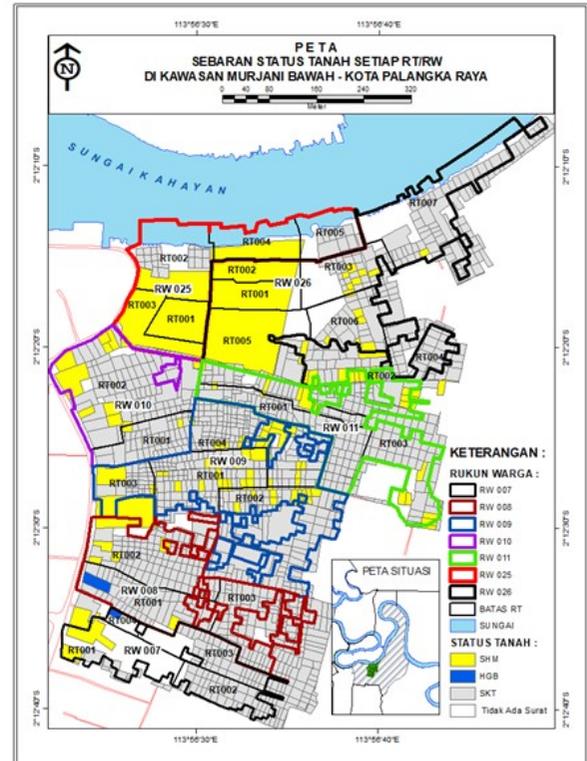
Berdasarkan hasil analisis spasial yang disusun dalam Tabel 7 diperoleh bahwa sebagian besar status tanah dilokasi penelitian merupakan status tanah berupa surat keterangan tanah (SKT/SPPT). Hasil pengamatan dilapangan ditemukan informasi bahwa sebagian besar masyarakat yang bermukim di kawasan Murjani Bawah menggunakan tanah untuk membangun rumah dengan sistem sewa menyewa.

Kondisi ini tentunya akan menjadi sulit ketika pemerintah melakukan penanganan 7 (tujuh) kriteria kekumuhan di lokasi tersebut, khususnya adalah Pengelolaan air limbah dimana akan membangun instalasi pengelolaan limbah yang sifatnya komunal atau terpusat karena tanahnya bukan dimiliki masyarakat setempat (Gambar 12).

4.3 Prioritas Penanganan

Prioritas penanganan penyebab utama tingkat kekumuhan di lokasi kawasan Murjani Bawah disajikan pada Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa prioritas utama dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Murjani Bawah berdasarkan variabel atau 7 (tujuh) kriteria



Gambar 12. Sebaran status tanah di kawasan Murjani Bawah

kekumuhan yang diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 yang tertinggi adalah pengelolaan air limbah sebesar 97%, persampahan sebesar 88% dan pengelolaan air minum 80% dan drainase lingkungan sebesar 78%. Adapun jalan lingkungan dan bangunan serta keamanan kebakaran masing-masing 72%, 66% dan 51%.

Dengan demikian penanganan pada permukiman kumuh di kawasan Murjani Bawah dilakukan adalah prioritas pertama, kedua dan ketiga serta prioritas keempat, apabila dapat tertangani maka nilainya akan besar sehingga dapat mengurangi tingkat kekumuhan yang sangat mendasar dan dapat meningkatkan status kekumuhan dari kumuh ringan menjadi tidak kumuh untuk seluruh wilayah rukun tetangga (RT).

Tabel 8 Prioritas penanganan terhadap penyebab kekumuhan

Indikator	Hasil perhitungan	Persentase	Prioritas
Bangunan	0.661830357	66%	6
Jalan Lingkungan	0.720238095	72%	5
Pengelolaan Air minum	0.803571429	80%	3
Drainase Lingkungan	0.783482143	78%	4
Pengelolaan Air Limbah	0.978571429	97%	1
Pengelolaan Persampah	0.883928571	88%	2
Proteksi Kebakaran	0.516369048	51%	7

Kendala penanganan sehingga kekumuhan di lokasi tersebut tidak dapat dilaksanakan khususnya pengelolaan air limbah, persampahan dan pengelolaan air minum serta drainase lingkungan, karena berdasarkan analisis spasial terhadap tipologi dan karakteristik lahan sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dikarenakan lokasi tersebut berupa daerah dengan tipologi dataran rendah dan rawan banjir. Sementara itu berdasarkan karakteristik lahan merupakan rawa basah yang selalu berpotensi banjir dan genangan yang tinggi, pembebasan lahan serta kondisi bangunan yang sangat rapat jaraknya. Apabila akan dilakukan pembangunan memerlukan biaya yang cukup besar karena menggunakan teknik khusus dan bahan khusus serta rekayasa lahan yang kompleks serta biaya pembebasan lahan dan pembongkaran rumah yang sangat rapat jaraknya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan baik terhadap tingkat kekumuhan, karakteristik lahan, tipologi permukiman, status tanah dan hasil kuesioner dilokasi diperoleh bawah penyebab utama tingkat kekumuhan yang tidak tertangani selama tahun 2018, 2019 dan 2020 dilokasi kawasan Murjani Bawah adalah, pertama aspek pengelolaan limbah; kedua aspek persampahan ketiga aspek air minum dan keempat aspek drainase lingkungan. Tetapi penyebab utama yang paling menyebabkan kekumuhan berdasarkan 7 (tujuh) kriteria penyebab kekumuhan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 di lokasi kawasan Murjani Bawah adalah pengelolaan Air Limbah dengan persentase 97% dan skor tingkat kekumuhan 16-37.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas penanganan terhadap penyebab tingkat kekumuhan berdasarkan hasil kuesioner terhadap responden ketua rukun tetangga (RT) berdasarkan 7 (tujuh) kriteria dan 16 (enam belas) sub kriteria yang ditetapkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 yang pertama adalah pengelolaan air limbah sebesar 97%, persampahan 88%, penyediaan air minum 80%, drainase lingkungan 78% dan jalan lingkungan 72% dan bangunan 66% serta keamanan (proteksi) kebakaran 51%.

Beberapa kriteria dari 7 (tujuh) kriteria berdasarkan peraturan tersebut tidak dapat seluruhnya dilakukan penanganan karena berhubungan dengan tipologi dan karakteristik lahan dilokasi kawasan Murjani bawah, khususnya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) domestik untuk mengurangi tingkat kekumuhan, pembangunan drainase lingkungan untuk mengurangi tingkat kekumuhan kriteria drainase, dan persampahan. Hal tersebut terkait dengan kondisi karakteristik lahan dan tipologi permukiman serta status tanah dan kondisi fisik

bangunan yang sangat rapat jaraknya sehingga kalau dilakukan penanganan dilokasi tersebut memerlukan teknik dan biaya yang cukup besar dan belum tentu memperoleh hasil yang optimal dalam pengurangan kekumuhan.

Dari 7 (tujuh) kriteria tersebut, pengelolaan air limbah yang menempati prioritas pertama untuk mengurangi kekumuhan dan penyebab penyumbang paling besar terhadap tingkat kekumuhan di kawasan Murjani Bawah, apabila penanganan kriteria pengelolaan air limbah dapat terlaksana maka akan cukup besar penurunan tingkat kekumuhannya di seluruh wilayah rukun tetangga (RT) di lokasi tersebut, tetapi kalau tidak dapat dilaksanakan maka status kumuh dan tingkat kekumuhan akan tetap ada di kawasan Murjani Bawah tersebut.

Dalam penanganan kekumuhan suatu permukiman khususnya di kawasan Murjani Bawah, pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama terlibat langsung dalam penanganannya (Kolaboratif) baik untuk pembiayaannya maupun secara teknis.

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14/PRT/M/2018 dalam penetapan 7 (tujuh) kriteria dan 16 (enam belas) sub kriteria penyebab kekumuhan suatu kawasan permukiman, tidak dapat seluruhnya dilaksanakan penanganannya di kawasan Murjani bawah. Hal tersebut dikarenakan sudah seharusnya peraturan tersebut dalam menetapkan kriteria kekumuhan berdasarkan setiap tipe dan karakteristik lahannya, dimana dalam peraturan tersebut masih bersifat umum dan berlaku tanpa melihat karakteristik dan tipologi yang ada, sehingga penanganannya sulit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, N., 2013. Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Jupiter*, 12(1), 1-10.
- Arikunto, S., 2019. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyono, S., & Supriadi, D., 2018. Analisis tingkat kekumuhan dan pola penanganannya pada lokasi permukiman (Studi Kasus: RW 04 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan). *Jurnal Ilmiah PlanoKrisna*, 12(2), 50-57.
- Dwiastuti, R., 2017. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-kualitatif*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramadhani, R.W., 2020. Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 117-129.
- Setianingtiyas, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A., 2019.

Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61-74.

Sukardi, P. D., 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarsunu, T., 2006. *Statistik dalam penelitian psikologi dan pendidikan*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tanggal 22 Mei 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785) *Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 *Tentang Rencana*

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019, (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023*

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1), *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039*

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 *Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*.